

BAB III

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONFLIK KRIMEA DI UKRAINA

Konflik internasional merupakan perselisihan yang terjadi antara dua negara atau lebih yang diakibatkan oleh salah satu pihak bertindak atau berbuat yang tidak semestinya kepada pihak yang lainnya. Salah satu isu dalam konflik internasional yang sering terjadi adalah konflik regional atau konflik wilayah perbatasan. Konflik regional sendiri berawal setelah diberlakukannya sistem kedaulatan Westpalia, yaitu sistem kedaulatan yang bebas dari campur tangan pihak asing dengan melalui pembuatan sistem perbatasan negara atau wilayah yang tegas.

Dari sistem kedaulatan tersebut akhirnya seluruh negara di dunia menerapkan pembatasan wilayah negaranya sehingga dapat diketahui dengan pasti letak dan luas suatu negara. Karena pembatasan wilayah negara ini, akhirnya menimbulkan kemungkinan terjadinya konflik atas nama perbatasan demi kedaulatan suatu negara.¹

Seperti konflik yang terjadi di Ukraina, konflik tersebut terjadi karena perebutan wilayah Krimea yang pada awalnya adalah milik negara Ukraina. Aktor yang terlibat di dalam konflik tersebut tidak hanya dua negara saja namun juga melibatkan beberapa negara lain dan lembaga internasional. Terdapat empat aktor utama dalam konflik tersebut yaitu Ukraina, Rusia Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Di dalam konflik tersebut, Rusia yang melakukan aneksasi terhadap Krimea yang merupakan wilayah kedaulatan Ukraina

¹ Rosyidin, Mohamad. *Konflik Internasional Abad ke-21? Benturan Antarnegara Demokrasi dan Masa Depan Politik Dunia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 18, No. 3, Maret 2015, pp. 223-236. Universitas Gadjah Mada. (Dapat diakses pada: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/13137/9372>)

menimbulkan berbagai kecaman dan kritikan dari negara-negara dan lembaga-lembaga internasional. Selain itu ada juga sanksi-sanksi yang diteruma oleh Rusia. Namun hal tersebut tidak membuat Rusia mengambil langkah mundur dan melepaskan Krimea. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai kronologi dari pertama terjadinya konflik tersebut hingga adanya campur tangan dari Amerika Serikat secara lebih terperinci.

A. Awal Mula Konflik di Ukraina

1. Pembatalan *EU-Ukraine Association Agreement*

Ukraina adalah negara yang terletak di Eropa Timur dan merupakan sebuah negara pecahan dari Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991. Sejak tahun 1990-an, Ukraina telah mengupayakan integrasi dengan Eropa Barat, akan tetapi proses ini terkendala oleh pertentangan dari negara tetangga yakni Rusia.

Kemajuan Ukraina di bidang ekonomi dan politik dapat dikatakan berjalan lambat, hal ini sebagian disebabkan oleh kurang tampaknya prospek dari Uni Eropa untuk memasukkan Ukraina ke dalam daftar keanggotaannya, yang dimana merupakan stimulus utama bagi perubahan negara tersebut di kawasan Eropa Tengah pada dekade 1990-an. Ukraina mulai menjalin hubungan dan mempertanyakan keanggotaannya di Uni Eropa sejak tahun 1995. Kejelasan mengenai keanggotaan mulai muncul awal 2005 dan berlanjut pada pembahasan tentang kesepakatan yang mencakup zona perdagangan bebas atau *Deep & Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)* dan kerja sama lebih erat di bidang energi dilakukan pada tahun 2007.²

² Fadly, Muhammad. 2015. *Kebijakan Presiden Ukraina Victor Yanukovych Menolak Menandatangani Eu-Ukraine Association Agreement dengan Uni Eropa Tahun 2013. Jom FISIP* Volume 2 No.2 Oktober 2015. Pekanbaru: Universitas Riau.

Pada 21 November 2013, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Viktor Yanukovych, justru mengeluarkan kebijakan untuk menunda penandatanganan *EU-Ukraine Association Agreement*³. Kemudian pada tanggal 29 November 2013 di pertemuan puncak Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych pada akhirnya membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa.

Dalam kasus penolakan penandatanganan EU-Ukraine Association Agreement, orientasi luar negeri sudah lama terbagi menjadi dua. Parlemen menghendaki perbaikan dengan cara berintegrasi ke Uni Eropa, sedangkan eksekutif pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Yanukovych memiliki pemahaman untuk tetap menjadikan hubungan dengan Rusia sebagai hubungan luar negeri yang patut diprioritaskan. Kebijakan penolakan yang dilakukan Yanukovych memperlihatkan bahwa perumusan kebijakan luar negeri Ukraina dipengaruhi oleh berbagai birokrat dan tidak hanya memfokuskan pada pembuat keputusan politik luar negeri suatu negara saja, melainkan para birokrat dari negara lain, dalam hal ini Rusia. Rusia dengan para birokratnya mempengaruhi kebijakan luar negeri Ukraina dengan berbagai cara antara lain tekanan, ancaman, dan pertemuan-pertemuan yang mendesak hasil kebijakan luar negeri Ukraina.⁴

Dalam menyikapi rencana perjanjian perdagangan antara Ukraina dengan Uni Eropa, Rusia memberikan tekanan awal kepada Ukraina berupa mempersulit

³ EU-Ukraine Association Agreement adalah kesepakatan bilateral antara Uni Eropa dengan negara ketiga. Dalam konteks hubungan untuk mencapai kedekatan dengan Uni Eropa. Isi dari kesepakatan ini mengatur tentang standar dalam implementasi proses akses tersebut. (sumber: *European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations*, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/association-agreement_en)

⁴ *Ibid.* Fadly. Hlm. 4

pemeriksaan bea cukai barang-barang impor Ukraina untuk masuk ke pasar Rusia dan memberikan sanksi perdagangan secara terbuka untuk melawan Ukraina pada bulan Juli dan Agustus 2013. Sanksi perdagangan ini merupakan „perang dagang“ yang mengakibatkan penurunan aktivitas produksi dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran di berbagai perusahaan besar di Ukraina, yang secara otomatis menyebabkan penurunan pendapatan anggaran dalam bentuk pajak dan kontribusi sosial. Pada saat yang sama, defisit anggaran Ukraina telah mencapai tingkat sangat kritis, yaitu melebihi \$ 2,8 miliar.

Ekonomi Ukraina sangat bergantung pada ekspor baja, batu bara, bahan bakar dan produk minyak bumi, bahan kimia dan biji-bijian, yang lebih dari 60 persen diekspor ke Rusia dan negara-negara bekas soviet lainnya seperti Belarus dan Kazakhtan. Sanksi perdagangan bilateral yang dilakukan Rusia merupakan langkah yang luar biasa berdampak bagi perekonomian Ukraina. Sanksi dagang juga diarahkan untuk memberikan tanda bahwa ekonomi Ukraina akan mengalami penurunan drastis apabila sepakat dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Tekanan berikutnya yang diberikan oleh Rusia adalah ancaman terhadap hutang gas Ukraina. Selama beberapa tahun terakhir Rusia telah mencoba menjerat Ukraina lewat ketegantungannya terhadap Gas, akan tetapi negara tetangga tersebut tetap berusaha masuk ke pasar Uni Eropa. Perihal EU-Ukraine Association Agreement, pemerintah Ukraina berusaha menenangkan kekhawatiran Rusia dengan berjanji untuk tetap menjalin kerjasama yang strategis dengan Rusia serta tidak membebani pasar yang sudah ada, meskipun begitu Rusia tetap menolak untuk memotong harga gas yang dijualnya ke Ukraina sebagai ketidaksetujuan terhadap kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa. Harga gas Rusia masih berkisar 400 dollar per seribu kubik sesuai dengan kontrak tarif gas tahun 2009, dan Rusia menolak untuk menegosiasikan ulang kontrak tersebut.

Ketetapan harga gas yang tidak bisa diubah dan perekonomian Ukraina yang belum menunjukkan perbaikan malah semakin memburuk membuat harga gas sulit untuk tetap dibayar sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dalam perjalanan kerjasama Ukraina dan Rusia di sektor gas memang seringkali Ukraina telat dalam pembayaran gas, dan faktor ini juga yang menyebabkan konflik gas yang pasang-surut di antaranya keduanya. Pada bulan Oktober 2013, permasalahan terkait keterlambatan pembayaran gas muncul kembali. Ukraina memiliki hutang sekitar 882 juta dollar untuk persediaan gas di bulan Agustus yang belum dibayar. Ukraina sendiri tidak mampu untuk membayar hutang tersebut diakibatkan pergerakan ekonomi yang belum mengalami stabilitas paska pemberian sanksi dagang Rusia

Rusia juga melakukan tekanan langsung melalui para birokrat antara untuk mendesak pembatalan EU-Ukraine Association Agreement. Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa kali melakukan kunjungan ke Ukraina untuk melakukan pertemuan dengan Viktor Yanukovich, ketika waktu keputusan perjanjian dengan Uni Eropa semakin mendekat. Pada pertemuan bulan Juli, Vladimir Putin mendesak Viktor Yanukovich untuk bergabung dengan Eurasian Customs Union dan bukannya menjalin hubungan kerjasama yang lebih dekat dengan Uni Eropa. Vladimir Putin mencatat bahwa sektor perdagangan Ukraina menyusut 18 persen pada 3 bulan pertama tahun pertama 2013, sementara omset perdagangan tumbuh sekitar 2-3 persen di negara-negara anggota Eurasian Custom Union, yakni Belarus dan Kazakhstan.

Victor Yanukovich berpendapat bahwa Uni Eropa memang merupakan pasar yang besar, akan tetapi persaingan yang ada lebih sulit dan Ukraina membutuhkan waktu lama untuk masuk ke pasar Uni Eropa bersama 28 negara anggota lainnya. Hal itu tidak sebanding dengan kehilangan kerjasama perdagangan dengan anggota Eurasian Custom Union yang mampu memberikan

pengaruh besar bagi perekonomian Ukraina yang masih berjuang untuk keluar dari resesi kedua dalam lima tahun terakhir. Pada bulan Oktober, Putin secara teratur mengirimkan Sergey Glazyev selaku penasihat Putin ke Ukraina agar memberikan gambaran kemungkinan terburuk bagi Ukraina dan mengetahui respon sesegera mungkin. Glazyev sendiri mengunjungi Yanukovych sebanyak tiga kali dan pada satu kunjungan Glazyev membawa terjemahan teks bahasa Rusia dari rancangan perjanjian asosiasi karena Uni Eropa hanya mengirimkan teks versi bahasa Inggris ke Ukraina.

Kedua pemimpin negara Ukraina dan Rusia bertemu kembali di Konferensi Tingkat Tinggi Commonwealth of Independent States di ibukota Belarus, Minsk pada 25 Oktober. Secara umum konferensi itu membahas kerja sama masalah kejahatan transnasional, dan peningkatan kemitraan ekonomi. Yanukovych menekankan bahwa pengembangan perdagangan dan kerjasama ekonomi antara negara-negara CIS akan menjadi salah satu poin kebijakan luar negeri Ukraina. Sementara Putin menyatakan tidak akan melarang barang-barang impor Ukraina untuk masuk ke pasar tetapi barang-barang tersebut tidak akan menikmati lagi manfaat dari zona perdagangan bebas di dalam kawasan CIS dan apabila Ukraina menandatangani EU-Ukraine Association Agreement, maka Ukraina tidak dapat bergabung ke dalam Eurasian Customs Union.

Karena berbagai desakan tersebut, Presiden Viktor Yanukovych lebih memilih membuat kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia tanggal 17 Desember 2013 dalam persidangan ke-6 Komite Kerjasama antar pemerintah Rusia-Ukraina, kedua pihak telah menandatangani 14 naskah kerjasama 'Joint Action Plan'. Sejumlah kesepakatan penting terkait bantuan Rusia terhadap Ukraina antara lain. Pertama, Rusia memberikan diskon harga gas lebih sehingga harga gas dari 400 dollar AS menjadi hanya 268,5 dollar AS per 1.000 kubik meternya. Kedua, pemerintah Rusia telah memutuskan

menggunakan dana sebanyak 495 miliar Rubel (sama dengan 15 miliar dolar AS) dari Dana Kesejahteraan Sosial Nasional Rusia untuk membeli obligasi Ukraina.⁵

Tidak hanya itu, Presiden Yanukovych bahkan memutuskan untuk menerima utang dari Rusia sebanyak 15 miliar dolar AS. Rusia memberikan utang tersebut sebagai bentuk “kompensasi” karena Ukraina batal melakukan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Akibat dari batalnya kesepakatan tersebut, masyarakat wilayah barat yang menginginkan agar Ukraina mendekatkan diri dengan Eropa Barat dan kaum nasionalis, kemudian menggelar demonstrasi.⁶

2. Penurunan Presiden Yanukovych

Dengan ditanggungkannya penanda tanganan EU-Ukraine Association Agreement tanggal 21 November, masyarakat Ukraina yang mendukung integrasi Eropa lebih lanjut mendirikan tenda di pusat Kiev, ibukota Ukraina. Kepastian penolakan perjanjian dengan Uni Eropamembuat mengakibatkan sekitar 10.000 masyarakat melakukan demonstrasi di Lapangan Kemerdekaan Kiev tanggal 30 November. Pemerintah kemudian melarang semua bentuk demonstrasi akan tetapi aksi unjuk rasa dilanjutkan tanggal 1 Desember dengan jumlah demonstran sepuluh kali lipat dari sebelumnya yakni 100.000 pengunjung rasa beserta kubu oposisi dan pada tanggal 8 Desember berjumlah sekitar 500.000 massa yang menyerukan gerakan penentangan melawan Yanukovych sehingga mengakibatkan bentrokan dengan aparat polisi.

Dalam menangani unjuk rasa ini, pemerintah Ukraina menggunakan kekuatan militer seperti polisi dan pasukan anti huru-hara untuk menekan pengunjung rasa hingga banyak demonstran yang terluka. Beberapa pertemuan

⁵ *Ibid.*

⁶ Lisbet. 2014. *Krisis Ukraina*. INFOSingkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 05/1/P3DI/Maret/2014. Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI.

diadakan untuk membahas solusi demi berakhirnya krisis yang terjadi, seperti pertemuan Viktor Yanukovych dengan ketiga presiden pendahulunya yaitu Leonid Kuchma, Leonid Kvarchuk, dan Viktor Yuschenko. Pertemuan itu gagal membuahkan hasil karena Yanukovych menolak gagasan revolusi yang diserukan kelompok oposisi yang juga dikemukakan oleh ketiga presiden tersebut. Kepala Urusan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Wilson dan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Victoria Nuland mengadakan pertemuan serupa dengan Yanukovych untuk mengakhiri krisis politik namun tetap tidak mendapatkan titik kesepakatan solusi bagi krisis.

Krisis politik yang terjadi Ukraina semakin meninggi dikarenakan para anggota parlemen pro-pemerintah Ukraina meloloskan undang-undang anti-protas pada bulan Januari dalam upaya menekan upaya protes terhadap presiden. Berdasarkan undang-undang (UU) baru yang didukung oleh 235 suara dari total 450 suara anggota parlemen, seseorang akan dikenai hukuman sampai 5 tahun penjara apabila ikut memblokade sebuah kantor publik. Undang-Undang itu menyederhanakan prosedur untuk menuntut anggota parlemen dan demonstran yang mengenakan masker atau helm akan dikenakan denda atau penahanan administratif. Hukuman denda atau kerja paksa sampai satu tahun juga diperuntukkan bagi siapa saja yang menyebarkan fitnah dan berita-berita yang memprovokasi di internet. UU yang keras itu menimbulkan protes di kalangan pemimpin oposisi yang mengkhawatirkan pemerintah akan menggunakannya untuk menuntut mereka dan membubarkan gerakan protes.

Euro-Maiden, yaitu pasukan demonstrasi yang anti-pemerintahan juga tidak berhenti mendesak wakil rakyatnya untuk mengembalikan konstitusi Ukraina kembali ke konstitusi 2004, dimana kekuasaan tertinggi berada di parlemen bukan di tangan presiden. Dalam upayanya memberikan konsesi kepada oposisi, Yanukovych mempertimbangkan untuk menggelar

pemilihan umum dini guna mengatasi krisis politik, namun kubu oposisi justru menuduh pemimpin Ukraina itu, yang menghadapi pemilu tahun 2015 hanya mengulur waktu dibandingkan berupaya menyelesaikan kerusuhan politik yang telah mengubah ibukota Kiev menjadi zona perang. Yanukovych juga melakukan pertemuan dan telah menawarkan posisi Perdana Menteri kepada perwakilan oposisi Arseniy Yatsenyuk tetapi pihak oposisi belum menerima tawaran itu sebelum keputusan pasti dari parlemen. Upaya lain yang dilakukan Yanukovych adalah dengan membatalkan undang-undang anti-unjuk rasa dan tawaran jaminan amnesti bagi demonstran yang sudah dipenjarakan.

Di dalam kekacauan tersebut, Parlemen Ukraina sendiri juga mengalami perdebatan antar anggota yang memperselisihkan amandemen konstitusi untuk mengurangi kekuasaan presiden. Amandemen konstitusi baru dipercaya akan memberikan lebih banyak kekuasaan bagi posisi Perdana Menteri. Di lain pihak Rusia yang menjanjikan paket talangan sebesar 15 miliar dollar AS dalam kesepakatan Joint Action Plan menunda pencairan dana awal sebesar 3 miliar dollar AS sampai konfirmasi lebih lanjut dari pemerintah Ukraina. Sementara itu pihak Uni Eropa juga berupaya menggalang kemungkinan bantuan finansial baik dari Uni Eropa beserta Amerika, akan tetapi jumlah bantuan finansial sangat sulit menandingi paket talangan dari Rusia.

Demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Ukraina yang dimulai sejak akhir bulan November 2013 hingga Februari 2014 ini merupakan demonstrasi terbesar sejak Ukraina merdeka tahun 1991 bahkan lebih besar dari peristiwa revolusi oranye tahun 2005. Krisis politik yang tinggi mengakibatkan terjadinya beberapa kali bentrokan dan pasang-surut unjuk rasa serta pengepungan hingga pendudukan beberapa gedung pemerintah. Sekitar 85 persen dari total kawasan Ukraina penuh dengan amukan protes dan demonstrasi paling berdarah terjadi pada 18-19

Februari 2014 dimana tercatat sekurang-kurangnya 77 orang tewas dalam demonstrasi tersebut dan 600 lainnya terluka serta lebih kurang 250 demonstran ditahan (kemudian dibebaskan).

Para pejabat pemerintahan Ukraina yang mendapatkan tekanan terus menerus dari para demonstran pro-Uni Eropa semakin tidak tahan menghadapi gelombang massa, termasuk Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov yang mengundurkan diri dari jabatan pemerintahannya pada 28 Januari 2014. Tidak hanya perdana menteri, tetapi seluruh anggota Cabinet of Minister mengundurkan diri di bawah tekanan oposisi. Parlemen yang sebelumnya dikuasai oleh pendukung Yanukovych, mulai mengambil kontrol kepemimpinan negara. Hal ini dibuktikan dengan pengunduran diri ketua parlemen, Volodymyr Rybak yang merupakan sekutu Yanukovych. Posisi ketua parlemen selanjutnya digantikan oleh Oleksander Turchynov yang merupakan sekutu Yulia Tymoshenko-lawan politik Yanukovych.

Sebagai parlemen, Verkhovna Rada berusaha bergerak cepat untuk segera mengakhiri krisis dan dengan bantuan diplomat Uni Eropa akhirnya mayoritas suara parlemen memberikan suara untuk mosi tidak percaya dan memulihkan konstitusi yang membatasi wewenang presiden dan mengubah aturan hukum yang memungkinkan pembebasan Yulia Tymoshenko tanpa perlu tanda tangan presiden. Parlemen mempertimbangkan beberapa pilihan yakni untuk memakzulkan presiden atau memaksa presiden mengundurkan diri dan mempercepat pemilu. Parlemen juga memberikan suara untuk memecat Menteri Dalam Negeri Ukraina Vitaly Zarkharchenko, pejabat yang setia kepada Yanukovych, yang menurut oposisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah 20 Februari. Sementara itu, pihak Uni Eropa dan Rusia saling tuduh ikut campur dalam urusan domestik Ukraina.

Verkhovna Rada membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk dapat menentukan keputusan akhir dalam

menyelesaikan krisis yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Parlemen memutuskan untuk memberhentikan Presiden Viktor Yanukovich pada 22 Februari 2014 setelah dinyatakan secara konstitusional tidak dapat menjalankan tugas pemerintahannya. Selanjutnya Verkhovna Rada menunjuk Ketua Verkhovna Rada Oleksander Turchinov sebagai presiden ad interim yang menggantikan posisi presiden untuk sementara serta berencana menyelenggarakan pemilihan presiden pada 25 Mei 2014. Pemberhentian Yanukovich oleh parlemen sesuai dengan prosedur impeachment atau pemakzulan presiden yang diatur dalam konstitusi.

Penyidik *Ad Hoc* dibentuk sebagai mekanisme awal dari prosedur *impeachment* dimana penyidik *Ad Hoc* ini terdiri dari jaksa penyidik khusus untuk melakukan penyelidikan. Hasil penyidikan dari komisi penyidik ad hoc harus diberikan kepada Verkhovna Rada. Jika presiden terbukti dinyatakan melakukan kejahatan, maka Verkhovna Rada harus mengajukan rekomendasi keputusan untuk mendakwa presiden dengan minimal dua pertiga suara dari total suara keanggotaan parlemen. Verkhovna Rada kemudian memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan konstitusi review apakah memang presiden melakukan pelanggaran, unsur pengkhianatan, atau kejahatan. Maka dengan meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung terbukti melakukan pelanggaran maka prosedur pemberhentian presiden dapat dilakukan.

Tidak hanya digulingkan dari posisinya sebagai presiden, Viktor Yanukovich juga langsung dijadikan tersangka bersama sejumlah pejabat pemerintahan lainnya dengan tuduhan memerintahkan ‘pembunuhan massal’ dalam bentrokan berdarah tanggal 18-19 Februari. Keputusan parlemen sangat disambut baik oleh para demonstran dan kubu oposisi sehingga tensi krisis mengalami penurunan dan mereda. Tanggapan berbeda datang dari Yanukovich sendiri yang mengecam

pemecatannya sebagai bentuk kudeta dan menuding keputusan yang dibuat parlemen Ukraina merupakan keputusan yang ilegal. Diketahui Yanukovych berlindung di pangkalan angkatan laut Rusia di Semenanjung Crimea pasca kebijakan parlemen diumumkan. Di lain pihak, Rusia membatalkan kesepakatan yang tercantum dalam *Joint Action Plan* dengan membatalkan janji talangan utang senilai 15 miliar dollar AS dan membatalkan potongan harga gas 30 persen yang dijual kepada Ukraina.

3. Kekecewaan Rakyat Krimea

Digulingkannya Yanukovych dari jabatan presidennya tersebut, menyebabkan kekecewaan dari rakyat Krimea yang notabene mayoritasnya memiliki garis keturunan Rusia. Sedangkan dari pihak Rusia bahkan menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa mendanai dan mengarahkan “revolusi Ukraina” dan memandang bahwa Yanukovych diberhentikan secara ilegal dan tetap menganggap Yanukovych sebagai presiden Ukraina.⁷

Pada 26 Februari 2014, pasukan pro-Rusia mulai menguasai semenanjung Krimea. Banyak yang mempercayai bahwa pasukan tersebut merupakan personel militer Rusia. Pada saat orang-orang bersenjata menguasai gedung parlemen Krimea, anggota parlemen Krimea melakukan pemungutan suara untuk memberhentikan pemerintahan Krimea, mengganti perdana menteri dan menyerukan referendum mengenai otonomi Krimea. Tak lama kemudian, pada 16 Maret 2014, dilaksanakan referendum mengenai sikap politik Krimea untuk bergabung dengan pemerintah Federasi Rusia dengan perolehan suara 96,77% (Krimea) dan 95,6% (Sevastopol).⁸

⁷ Kartini, Indriana. 2014. *Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina*. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No.2. hh. 27-41.

Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

⁸ *Ibid.*

Hal ini akan dibahas lebih komprehensif pada sub-bab selanjutnya.

B. Aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia

Indriana menjelaskan dalam penelitiannya, aneksasi Semenanjung Krimea oleh Rusia dimulai pada hari Jumat, 28 Februari 2014, Ukraina melalui Menteri Dalam Negeri, Arsen Avakov, menyatakan bahwa Rusia melancarkan invasi bersenjata setelah satuan-satuan Angkatan Laut Rusia mengepung bandara udara di kota Sevastopol, yang merupakan tempat armada Laut Hitam Rusia, Semenanjung Crimea. Rusia menganeksasi Ukraina dengan mengirimkan pasukan militernya ke Crimea.

Pada Senin 3 Maret 2014 Pasukan Rusia juga telah memblokir layanan telepon seluler di beberapa daerah. Penumpukan armada Rusia berada di dekat pelabuhan feri di sisi Rusia dari Kerch, di seberang kota Kerch, Ukraina. Rusia telah menggunakan pesawat, kapal dan helikopter untuk mendarat di semenanjung Crimea, Ukraina. Rusia beralasan adanya kemungkinan pembersihan warga etnis Rusia di Crimea oleh masyarakat yang melakukan kudeta terhadap Viktor Yanukovich di Ukraina. Oleh karena itu Rusia datang ke Crimea dengan alasan menjaga keamanan warga Crimea bisa juga dikatakan sebagai perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang dijelaskan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada tanggal 3 Maret 2014.⁹

“Ketika kita melihat ini kita memahami apa kekhawatiran warga Ukraina, baik Rusia dan Ukraina, dan penduduk berbahasa Rusia di wilayah timur dan selatan Ukraina. Ini adalah kejahatan yang tidak

⁹ Herzog, Chrisella. 2014. *Political Legitimacy and International Law in Crimea: Pushing the U.S. and Russia Apart*. (<https://www.diplomaticourier.com/political-legitimacy-and-international-law-in-crimea-pushing-the-u-s-and-russia-apart/>, diakses 4 Januari 2018)

terkendali ini yang mengkhawatirkan mereka...

...Oleh karena itu, jika kita melihat kejahatan yang tidak terkontrol tersebut menyebar ke daerah timur negara Ukraina, dan jika orang-orang meminta kami (etnis Rusia) untuk bantuan, sementara kita sudah memiliki permintaan resmi dari Presiden (Yanukovych) yang sah, kami mempertahankan hak untuk menggunakan segala cara yang tersedia untuk melindungi orang-orang itu. Kami percaya ini akan menjadi benar-benar sah."

Mantan presiden Viktor Yanukovych melalui suratnya kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, meminta agar Rusia memberikan bantuan pasukan militer di Ukraina guna memulihkan hukum dan keteriban. Isi surat ini dibacakan oleh Duta Besar Rusia untuk PBB, Vilyat Churkin, kepada Dewan Keamanan PBB:¹⁰

"Terjadi tindakan terror dan kekerasan secara kasat mata di bawah pengaruh negara-negara barat. Atas dasar alasan ini saya meminta Presiden Rusia, Putin, menggunakan kekuatan militernya untuk menegakkan legitimasi, perdamaian, hukum dan peraturan, stabilitas dan melindungi rakyat Ukraina."

Berdasarkan pada alasan tersebut, Rusia menganeksasi Krimea, Indriana menjelaskan turunnya pasukan militer Rusia ke Crimea sebelum datangnya surat permohonan bantuan dari mantan presiden terguling Viktor Yanukovych. Hingga akhirnya parlemen Crimea menjalani Resolusi No.1702-6/14 untuk melakukan referendum yang memutuskan Crimea akan tetap menjadi wilayah Ukraina atau bergabung dengan Rusia. Walaupun pemerintah Ukraina mengatakan tidak akan membiarkan Crimea lepas

¹⁰ Tempo.co. 2014. *Presiden Terguling Ukraina Berkirim Surat ke Putin*. (<https://dunia.tempo.co/read/559194/presiden-terguling-ukraina-berkirim-surat-ke-putin>, diakses 4 Januari 2018)

dari Ukraina, referendum tersebut tetap dijalankan.

Selain dikarenakan alasan tersebut, Rusia menganeksasi Krimea dikarenakan adanya unsur sejarah, strategis, dan *buffer zone*.¹¹ menurut sejarah, sejak awal abad ke-19 Rusia telah menjadi korban dari agresi militer dua negara. Yang pertama adalah agresi militer yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1812. Pada ekspansi yang dilakukan oleh Perancis ini daerah Moskow menjadi korban dari militer Perancis. Yang kedua, pada pemerintahan Adolf Hitler Jerman sempat menyerang Rusia dalam perang dunia II tahun 1941. Kedua serangan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi geopolitik dan keamanan, Rusia rentan terhadap serangan dan agresi dari negara-negara barat. Itulah alasan historis dan geopolitis bagi Rusia akan perlunya *sphere of influence* maupun *buffer-zone* di Eropa Timur untuk menahan kemungkinan berbagai serangan dari barat tersebut.

Dalam faktor strategis, Rusia sudah lama memiliki pangkalan militer angkatan laut di pelabuhan Sevastopol, Krimea. Pangkalan angkatan laut tersebut dianggap strategis karena menghadap langsung ke Laut Hitam. Pangkalan tersebut disewa oleh Rusia dari Ukraina dan telah diperpanjang hingga 2042. Pangkalan ini letaknya sangat strategis bagi Rusia karena di pangkalan Laut Hitam inilah kapal-kapal perang Rusia tetap leluasa beroperasi di musim dingin karena lautnya yang tidak beku. Dengan kejatuhan Presiden Yanukovych yang pro-Moskow, maka masa depan pangkalan angkatan laut strategis Rusia tersebut bisa menjadi tidak menentu. Sebagai titik strategis kekuatan militer di laut Hitam, Rusia jelas tidak akan

¹¹ Muhammad, Ali. 2017. "Selamat Datang Perang Dingin!" *Kepentingan Rusia di Krimea dan Ukraina Timur dan Ketegangan Hubungan dengan Barat*. (<http://hi.fisip.unsoed.ac.id/v2/wp-content/uploads/2017/02/1ARTIKEL-ALI.pdf>, diakses 4 Januari 2018)

merelakan kemungkinan penutupan pangkalan angkatan laut ini di masa depan. Bagi Rusia, aneksasi adalah pilihan tindakan rasional bagi Rusia.¹²

Negara-negara lain seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat menganggap tindakan Rusia dan referendum yang dilakukan oleh rakyat Krimea tidak sah karena melanggar konstitusi Ukraina, integritas teritorial serta hasilnya tidak akan di akui Amerika Serikat dan masyarakat internasional. Referendum yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2014 ini menghasikan suara 96,7 persen rakyat Krimea memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan memilih untuk bergabung dengan Rusia. Dari awal Rusia mengatakan apapun hasil dari referendum itu akan dihargai oleh Rusia dan menanggapi hal ini sebagai kebebasan berekspresi dari warga Krimea.¹³

Pada tanggal 18 Maret 2014 Federasi Rusia dan Republik Krimea membuat persetujuan Akses Republik Krimea di Federasi Rusia dan pembentukan entitas konstitusi baru dalam Federasi Rusia yang ditandatangani di Kremlin, Moskow. Perjanjian ini ditandatangani oleh berbagai pihak dari Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin, Ketua Dewan Negara Republik Krimea Vladimir Konstantinov, Perdana Menteri Republik Krimea Sergei Aksyonov dan Ketua Dewan Koordinasi untuk pembentukan pemerintahan kota Sevastopol Alexei Chaly. Republik Krimea setuju untuk bergabung dalam Federasi Rusia dengan menandatangani perjanjian tersebut.¹⁴

Namun, permasalahan ini menimbulkan kekesalan dari Presiden Ukraina, Poroshenko, diikuti dengan

¹² Muhammad, *Ibid.* Hlm. 6

¹³ Kartini, Indriana. *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹⁴ Indriana, *Ibid.*

pernyataannya yaitu:¹⁵

"Rakyat Ukraina tak akan pernah menikmati indahnya perdamaian kecuali kita bisa menyelesaikan masalah hubungan kita dengan Rusia. Rusia menduduki Crimea, yang merupakan dan akan selalu menjadi tanah Ukraina."

Tidak berhenti sampai di situ, lepasnya Krimea dari Ukraina mengakibatkan kemunculan pergerakan massa pro-Rusia yang semakin intensif di wilayah Ukraina bagian timur antara lain Kharkiv, Donetsk, Luhansk, Sloviansk, Odessa, Zaporizhzhia, dan Mykolayiv. Sebagian diantaranya menuntut untuk Ukraina menerapkan negara federal referendum dan menggabungkan diri dengan Rusia.

Pada 11 Mei 2014, separatistis pro-Rusia di bagian timur Ukraina mengadakan referendum kemerdekaan meski pemerintah Ukraina di Kyiv tidak mengakui referendum tersebut. Para pemilih di kawasan Donetsk dan Luhansk, yang penduduknya sekitar 15% dari populasi Ukraina, memberikan suara dengan hasil sekitar 90% warga di kedua wilayah tersebut memilih untuk melepaskan diri dari Ukraina. Kyiv membalas aksi separatisme tersebut dengan melancarkan operasi anti-teroris skala besar menghadapi separatistis pro-Rusia bersenjata yang menimbulkan korban di kedua belah pihak.¹⁶

Gambar 3.1

¹⁵ VOA Indonesia. 2014. *Poroshenko: Krimea Tetap Akan Jadi Bagian Ukraina*. (<https://www.voaindonesia.com/a/poroshenko-krimea-telah-dan-akan-menjadi-bagian-ukraina/1931782.html>, diakses 4 Januari 2018)

¹⁶ Kamasa, Frassminggi. *Krisis Ukraina dan Dampaknya Terhadap Tatahan Politik Global dan Regional*. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 1 Juni 2014. Hh. 79-108. Indonesian Publication Index

Peta Ukraina Timur¹⁷



C. Intervensi Amerika

Tindakan Rusia melakukan aneksasi Krimea maupun intervensinya di Ukraina Timur jelas melanggar norma hukum internasional dan tatanan internasional. Namun permasalahannya sekali lagi bukan masalah hukum tetapi masalah politik dan keamanan nasional Rusia. Rusia adalah sebuah *great power* atau bahkan masih *superpower militer*—dalam arti kemampuan dan kapabilitas militernya masih termasuk yang terkuat di dunia. Disamping Rusia merupakan negara nuklir terbesar, Rusia bukanlah negara sembarangan karena posisi politik sangat kuat karena merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa, respon seperti apa yang pas untuk mengukum Rusia itulah yang sangat dilematis. Upaya yang sudah dilakukan Barat adalah melakukan isolasi diplomatik dan sanksi ekonomi terhadap Rusia walaupun keduanya bukan tanpa masalah.¹⁸

¹⁷ Kamasa, *Ibid.*

¹⁸ Muhammad, Ali. *Selamat Datang Perang Dingin! : Kepentingan Rusia di Krimea dan Ukraina Timur dan Ketegangan Hubungan dengan Barat*. Disampaikan dalam forum seminar Convention on

Amerika Serikat bersama Uni Eropa bekerja sama untuk melakukan penggalangan diplomasi secara intensif dan sepakat mengutuk Rusia atas tindakannya menganeksasi Krimea. Pihak barat memperingatkan Rusia jika Rusia melakukan intervensi lebih luas ke daerah Ukraina Timur maka Pihak barat siap untuk memberikan sanksi ekonomi yang lebih berat lagi. Dalam implementasinya, para anggota G8 siap memberhentikan Rusia sebagai anggota secara sementara hingga Rusia mau msikapnya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam Majelis Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa berusaha membuju Cina untuk mendukung posisi Amerika dan Uni Eropa.

Namun pada akhirnya ketika diadakan voting mengenai illegalitas tindakan aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia, Cina memilih untuk abstain. Cina memilih abstain dengan alasan bahwa pengajuan ranres tidak tepat waktunya dan akan membuat situasi lebih rumit walaupun penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip non-intervensi merupakan dasar kebijakan luar negeri Cina.¹⁹ Ketiga belas anggota Dewan Keamanan lainnya memilih setuju, dan Rusia memilih menggunakan veto untuk membatalkannya. Hal itu menunjukkan bahwa Rusia benar-benar mendapatkan tekanan yang besar secara diplomatik di Dewan Keamanan PBB.

Selain tekanan diplomatik, pihak barat juga memberikan tekanan yang besar di bidang ekonomi. Pihak barat memberikan sanksi ekonomi kepada orang-orang penting di Rusia seperti para eksekutif senior, CEO yang mengendalikan perusahaan manufaktur besar di Rusia dan dekat dengan pemerintah. Sanksi ekonomi tersebut

European Studies di Universitas Gadjah Mada. Unsoed: Purwokerto. 2017 (dapat diakses pada <http://hi.fisip.unsoed.ac.id/v2/wp-content/uploads/2017/02/1ARTIKEL-ALI.pdf>)

¹⁹ Kamasa, *Op. Cit.*

meripakan pembekuan aset milik orang-orang tersebut yang berada di Amerika Serikat. Para anggota G7 juga berencana akan memberikan sanksi kepada sektor-sektor ekonomi strategis Rusia apa bila Rusia tetap melanjutkan intervensi atau aneksasinya terhadap wilayah selatan dan timur Ukraina, dimana mayoritas penduduknya adalah keturunan Rusia.

Sektor strategis yang dimaksud akan menjadi target sanksi adalah sektor industri energi, sektor perbankan dan sektor pertahanan. Namun demikian, pemberian sanksi tersebut tidak bias langsung diberlakukan tanpa pemikiran yang matang. Para petinggi Uni Eropa justru khawatir dengan langkah-langkah pemberian sanksi ekonomi tersebut. Perlu diketahui bahwa Rusia adalah salah satu mitra dagang terbesar Uni Eropa dan pemasok sumber energi gas alam terbesar untuk Uni Eropa.

Barat dan Rusia mempunyai potensi kerugian di bidang ekonomi apabila ketegangan di antara mereka terus berlanjut. Keduanya merupakan mitra dagang yang saling membutuhkan. Ekspor gas Rusia ke wilayah Eropa melalui jalur pipa Nord Stream dan Yamal mencapai 185 juta m³ per hari dan yang melewati Ukraina mencapai 16 juta m³ per hari. Adapun ekspor Rusia ke UE pada tahun 2013 mencapai 50% dari total eksportnya, sedangkan ekspor UE ke Rusia mencapai 7% dari total eksportnya.²⁰ Rusia bukanlah negara kecil yang akan dimana sanksi ekonomi juga akan membri dampak yang merugikan bagi Uni Eropa.

Namun berbagai sanksi tersebut mendapatkan balasan dari Rusia. Rusia mengumumkan tidak akan mengizinkan Amerika Serikat menggunakan motor roket buatan Rusia untuk kepentingan militer ke ruang angkasa. Penegasan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Dmitri Rogozin. Rogozin mengatakan larangan diterapkan sebagai tanggapan atas pemberlakuan sejumlah sanksi

²⁰ Kamasa, *Ibid.*

baru Amerika Serikat terhadap Moskow terkait dengan krisis di Ukraina. Rusia juga tidak akan memperpanjang penggunaan Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) setelah tahun 2020. Hal itu bertentangan dengan permintaan yang diajukan oleh Amerika Serikat.²¹

Di bidang militer, meski Rusia telah mengerahkan pasukan militernya ke wilayah Ukraina bagian timur dan selatan yaitu di Krimea dan telah melakukan aneksasi, Amerika tetap tidak bertindak menggunakan kekuatan militernya. Meski presiden Ukraina Petro Poroshenko telah meminta bantuan senjata kepada Amerika namun Presiden Obama masih bersikeras tak memenuhi permintaan Poroshenko memberikan bantuan tempur. Sebagai gantinya, AS menyampaikan bantuan nonsenjata bagi militer Ukraina sebesar 60 juta dolar AS.²²

Ali Muhammad dalam artikelnya yang berjudul “Selamat Datang Perang Dingin!” Kepentingan Rusia di Krimea dan Ukraina imur dan Ketegangan Hubungan dengan Barat juga menjelaskan papun yang akan dilakukan Rusia terhadap Ukraina—bahkan eandainya invasi militer—kecil kemungkinan NATO akan ambil resiko terlibat konflik langsung dengan Rusia. Konflik terbuka antara NATO dan Rusia terlalu mahal resiko yang akan ditanggung oleh NATO, dan yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa Rusia merupakan pemilik senjata nuklir besar di dunia. NATO tidak mau mengambil resiko konfrontasi langsung dengan Rusia bila saja negeri

²¹ National Geographic, *Krisis Ukraina Berdampak pada Stasiun Ruang Angkasa Internasional*. 2014. (dapat diakses pada: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/05/krisis-ukraina-berdampak-pada-stasiun-ruang-angkasa-internasional>)

²² Kisihandi, Ferry. *Ukraina Minta Bantuan Militer*. 2014. (Dapat diakses pada: <http://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/14/09/19/nc4tw96-ukraina-minta-bantuan-militer>)

ini diinvasi oleh Rusia. Disamping kekawatiran akan terjadi konfrontasi langsung, tetapi juga karena organisasi di NATO sendiri Ukraina bukanlah anggota. Namun, NATO masih bisa berperan untuk mencegah rencana Rusia dengan mengirim sinyal bantuan militer supaya terjadi deterrence effect dengan member bantuan militer ke negara tetangga Rusia seperti Estonia.